

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 1 April 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas, Halaman 1	1 April 2020	Tol Dibuka Hari Ini, Sumater Kian Efisien	Ruas jalan Tol Palembang-Kayu Agung sepanjang 33 kilometer di Sumatera resmi dibuka pada Rabu (1/4/2020) ini. Keberadaan tol yang mempercepat mobilitas orang dan barang itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
2	Koran Tempo, Halaman Ekonomi & Bisnis 2	1 April 2020	Pemerintah Mulai Kucurkan Stimulus Sektor Perumahan	Kementerian PUPR mulai hari ini memberlakukan stimulus fiskal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan bentuk stimulus tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk kredit pemilikan rumah.
3	Bisnis Indonesia, Halaman 6	1 April 2020	Jalan Tol Siapkan Skenario Karantina Wilayah	Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol telah menyiapkan sejumlah skenario jika pemerintah memutuskan karantina wilayah dan pelarangan mudik 2020.

Judul	Tol Dibuka Hari Ini, Sumatera Kian Efisien	Tanggal	43922
Media	Kompas, Halaman 1		
Resume	Ruas jalan Tol Palembang-Kayu Agung sepanjang 33 kilometer di Sumatera resmi dibuka pada Rabu (1/4/2020) ini. Keberadaan tol yang mempercepat mobilitas orang dan barang itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.		

INFRASTRUKTUR

Tol Dibuka Hari Ini, Sumatera Kian Efisien

PALEMBANG, KOMPAS — Ruas Jalan Tol Palembang-Kayu Agung sepanjang 33 kilometer di Sumatera resmi dibuka pada Rabu (1/4/2020) ini. Keberadaan tol yang mempercepat mobilitas orang dan barang itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Deputi Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dari PT Waskita Sriwijaya Tol Yusuf Ar Rosadi, Selasa (31/3), mengatakan, tol resmi dibuka pukul 07.00. Pembukaan dilakukan di pintu masuk Simpang Perdu, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sekitar 3 kilometer dari kawasan Jakabaring, Palembang, Sumsel. Sebagai bagian dari sosialisasi, pengguna tidak dikenai tarif pada awal pengoperasian Tol Palembang-Kayu Agung.

Keberadaan tol tersebut memangkas waktu perjalanan dari Palembang menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung menjadi sekitar empat jam. Jika menggunakan jalur lintas timur Sumatera, dibutuhkan waktu 13-17 jam.

Pembangunan Jalan Tol Palembang-Kayu Agung membutuhkan waktu hingga empat tahun. Pembangunan terbilang lama karena 90 persen ruas jalan tol ini dibangun di atas lahan rawa. "Kami menggunakan sistem vakum agar dapat membangun jalur tol ini. Itulah sebabnya, pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama," ujarnya.

Tol Palembang-Kayu Agung memenuhi kelayakan fungsi dan operasi, termasuk keberadaan gerbang tol dan rambu-rambu. Tempat untuk beristirahat (*rest area*) tidak tersedia karena panjang jalan tol hanya 33 km. Tempat untuk beristirahat dibangun di ruas tol yang panjangnya minimal 50 kilometer. "Kemungkinan, ketika ruas Palembang-Betung berlanjut, baru akan dibangun *rest area*," katanya.

Ruas jalan tol itu pernah diuji coba saat angkutan Natal dan Tahun Baru 2019. Hasilnya, terjadi kepadatan, tetapi teratasi. Saat itu, jumlah kendaraan yang melintas mencapai 16.000 kendaraan per hari.

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Tol Dibuka Hari Ini,

(Sambungan dari halaman 1)

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Sumsel Chairuddin Yusuf mengatakan, tol mempercepat pengiriman logistik. Keberadaan tol juga akan mengurangi kerusakan kendaraan lantaran jalan yang digunakan mulus, berbeda dengan jalur lintas timur yang berlubang.

Dari sisi biaya, pemanfaatan tol diprediksi memicu kenaikan biaya angkut sekitar 5 persen. Namun, hal ini terbayar oleh waktu tempuh yang berkurang signifikan.

Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Iwan Setiawan mengatakan, tol diproyeksi memicu pertumbuhan ekonomi Sumsel hingga 6 persen per tahun. Namun, proyeksi itu dibuat sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan juga mensyaratkan kemampuan daerah mengoptimalkan industri dalam pemanfaatan tol. "Jangan sampai Sumsel hanya dilewati, tetapi tidak menikmati manfaat ekonominya," ucap Iwan.

Tol Malang

Pengoperasian Tol Pandaan-Malang Seksi V yang membentang dari Pakis di Kabupaten Malang sampai Madyopuro di Kota Malang, Jawa Timur, masih menunggu Surat Keputusan Penetapan Tarif oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tol Seksi V yang memiliki panjang 3,1 kilometer itu memangkas waktu tempuh Surabaya-Malang sisi timur.

Direktur Teknik PT Jasa Marga Pandaan-Malang Siswanto saat dihubungi mengatakan, uji laik fungsi sudah dilakukan dan sertifikat laik fungsi terbit 23 Maret. SK penetapan tarif diharapkan segera terbit sehingga Tol Pandaan-Malang Seksi V bisa beroperasi sebelum Ramadhan.

Biaya pembangunan Tol Pandaan-Malang sepanjang 38,5 km ini Rp 5,97 triliun. Tol terdiri dari Seksi I Pandaan-Purwodadi (15,5 km), Seksi II Purwodadi-Lawang (8 km), Seksi III Lawang-Singosari (7,1 km), Seksi IV Singosari-Pakis (4,8 km), dan Seksi V Pakis-Malang (3,1 km). (RAM/WER)



Judul	Pemerintah Mulai Kucurkan Stimulus Sektor Perumahan	Tanggal	43922
Media	Koran Tempo, Halaman Ekonomi & Bisnis 2		
Resume	Kementerian PUPR mulai hari ini memberlakukan stimulus fiskal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan bentuk stimulus tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk kredit pemilikan rumah.		

EKONOMI DAN BISNIS

Pemerintah Mulai Kucurkan Stimulus Sektor Perumahan

Pengembang berharap ada stimulus lanjutan.

EDISI, 1 APRIL 2020



JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai hari ini memberlakukan stimulus fiskal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan bentuk stimulus tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk kredit pemilikan rumah.

“Kedua skema tersebut merupakan bentuk subsidi yang banyak diterima masyarakat,” ujar Heri dalam konferensi pers melalui sambungan video, kemarin. Anggaran yang disiapkan untuk 175 ribu rumah tangga MBR ini mencapai Rp1,5 triliun. Heri menjelaskan, dengan skema saat ini, konsumen bisa membayar angsuran KPR dengan suku bunga sebesar 5 persen per tahun selama 10 tahun. Pemerintah akan membayar subsidi sebesar selisih angsuran dengan suku bunga pasar dari yang harus dibayar nasabah.

Khusus untuk pembelian rumah tapak, MBR akan mendapatkan manfaat tambahan, yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui SBUM sebesar Rp 10 juta. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, SBUM yang diberikan sebesar Rp 10 juta. “Setidaknya ada tiga bank telah menyatakan minat sebagai bank pelaksana, yaitu Bank BTN, Bank BNI, dan Bank BRI. Kami masih membuka peluang bagi bank lain yang ingin bekerja sama,” ujar Heri.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan stimulus yang mulai berlaku hari ini juga harus didukung oleh layanan perbankan. “Karena belum tentu semua perbankan buka untuk melayani konsumen,” tutur Totok.

Totok berharap pemerintah juga memberikan pelonggaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap sektor properti. Sebab, sektor properti merupakan penggerak perekonomian karena memiliki lebih dari 150 industri turunan.

“Sebanyak 75 persen pengembang masuk kategori UMKM (usaha mikro, kecil,

dan menengah),” ujar Totok.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Daniel Djumali, mengatakan stimulus cukup memenuhi kebutuhan rumah bersubsidi sekitar 200-300 ribu unit tahun ini. Meski begitu, Daniel mengatakan, pengembang rumah subsidi dan non-MBR memerlukan bantuan stimulasi, baik berupa restrukturisasi, penundaan angsuran pokok, bunga, margin, bagi hasil, maupun penambahan kredit baru untuk memperkuat arus kas perusahaan.

“Kami juga perlu percepatan kelancaran pencairan akad kredit KPR karena menyangkut kelancaran arus kas pengembang, termasuk pembayaran ke pemasok dan tenaga kerja yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” ujar Daniel.

Ia menambahkan, sebelum terkena dampak Covid-19 saja, pengembang sudah merasakan dampak kelangkaan kuota subsidi. Untuk itu, pelonggaran skema akad KPR subsidi diperlukan. Skema yang berbelit-belit bisa menghambat pencairan kredit sehingga berdampak terhadap arus kas pengembang. “Selain itu, perlu dicari jalan keluar mengenai pembayaran validasi pajak, serta tertundanya proses sertifikasi BPN (Badan Pertanahan Nasional) akibat Covid-19,” ujar Daniel.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah Redjalam, mengatakan dampak stimulus fiskal di sektor perumahan belum akan terasa dalam waktu dekat. Menurut dia, stimulus mulai efektif memulihkan ekonomi saat wabah corona usai. “Apabila wabah terus memburuk, kejatuhan ekonomi tidak bisa ditahan,” kata dia.

LARISSA HUDA

Mengguyur Subsidi Rumah Rakyat

Presiden Joko Widodo mengguyurkan stimulus untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satu dari sembilan kebijakan tersebut menasar sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

- SSB (Subsidi Selisih Bunga)
- Penghasilan Rumah Tangga:
- Maksimal Rp 8 juta
- •Untuk pembelian satuan rumah susun di Papua dan Papua Barat Rp 8,5 juta.
- •Ditujukan untuk: Pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun.

Baca Juga

by Doble

- Kubu Amien Rais Bersiap Dirikan Partai Baru - Nasional
- Pemerintah Dorong Pemanfaatan Skema Baru Subsidi Perumahan - ...
- 2 sayuran ini akan musnahkan lemak perut dalam semalam

HerbalSlim

- Virus Berpindah dari Zona Merah - Laporan Utama
- Pemerintah Kembali Kucurkan Subsidi Selisih Bunga Perumahan - Ekonomi...
- BPK: Banyak Rumah Subsidi Tidak Dihuni - Ekonomi dan Bisnis

- •Uang Muka: 1 persen, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) selain Papua dan Papua Barat Rp 4 juta, dan SBUM Papua dan Papua Barat Rp 10 juta.
- •Suku bunga dan masa subsidi:
- •Suku bunga selain Papua dan Papua Barat sebesar 5 persen per tahun.
- •Suku bunga Papua dan Papua Barat sebesar 4 persen per tahun.
- Masa subsidi 10 tahun.

• FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)

- Penghasilan Rumah Tangga:
- Maksimal Rp 8 juta
- •Ditujukan untuk: Pembelian rumah tapak atau sarusun.
- •Uang Muka: 1 persen, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk rumah tapak Rp 4 juta.
- Suku bunga dan masa subsidi:
- Suku bunga 5 persen per tahun.
- Masa subsidi sepanjang tenor paling lama 20 tahun.
- BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)
- Penghasilan Rumah Tangga:
- •Penghasilan maksimal zona 1 Rp 7 juta untuk sarusun dan Rp 6 juta untuk swadaya.
- •Penghasilan maksimal zona 2 Rp 7,5 juta untuk sarusun dan Rp 6 juta untuk swadaya.
- •Penghasilan maksimal zona 3 Rp 8,5 juta untuk sarusun dan Rp 6,5 juta untuk rumah tapak.
- •Ditujukan untuk: Pembelian rumah tapak, sarusun, atau pembangunan rumah swadaya.
- Uang Muka: Dana BP2BT maksimal Rp 40 juta
- •Suku bunga dan masa subsidi: suku bunga pasar, paling tinggi sebesar Surat Utang Negara bertenor 10 tahun ditambah margin yang nilainya ditetapkan melalui perjanjian kerja sama operasi.

Judul	Jalan Tol Siapkan Skenario Karantina Wilayah	Tanggal	43922
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 6		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol telah menyiapkan sejumlah skenario jika pemerintah memutuskan karantina wilayah dan pelarangan mudik 2020.		

| ANTISIPASI COVID-19 |

Jalan Tol Siapkan Skenario Karantina Wilayah

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol telah menyiapkan sejumlah skenario jika pemerintah memutuskan karantina wilayah dan pelarangan mudik 2020.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan pihaknya siap menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan kebijakan karantina wilayah atau pelarangan mudik menyusul pandemi *Coronavirus disease 2019* (COVID-19).

"Kami mengikuti arahan Presiden, tetapi beberapa skenario pengurangan atau pelarangan penggunaan jalan tol, dengan pengecualian kendaraan logistik, sudah kami siapkan," jelasnya kepada *Bisnis*, Selasa (30/3).

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Agus Setiawan menyatakan siap melaksanakan kebijakan karantina wilayah jika diputuskan pemerintah.

Saat ini, dia menegaskan sudah mempelajari berbagai wacana alternatif kebijakan pembatasan pergerakan transportasi dan sudah disiapkan langkah antisipasinya. "Kami siap melaksanakan kebijakan pemerintah," katanya.

Pada pelaksanaan di lapangan, Jasa Marga akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan BPJT.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rencana pemerintah melarang mudik akan tetap memastikan aktivitas logistik tetap berjalan lancar dan seluruh ketentuan menjaga jarak sosial tetap berlaku.

Dalam memutuskan larangan mudik di tengah menyebarnya COVID-19, aktivitas bus antarkota antarprovinsi (AKAP) mungkin tidak beroperasi. "Tetapi, saya belum berani berspekulasi di sini," jelasnya, Selasa (31/3).

Terkait dengan larangan mudik, Luhut menyatakan belum tentu ada penutupan akses jalan. Alasannya, pergerakan barang tidak boleh terganggu meski ada pembatasan pergerakan orang.

Dia tidak menginginkan pelarangan mudik yang berakibat lumpuhnya aktivitas logistik. "Kami nanti akan sarankan supaya yang penting semua bisa lancar, tetapi *social distancing* jalan, orang yang tidak kerja juga bisa masih hidup dengan bantuan pemerintah." (*Agne Yasa/Aprianus Doni/Rinaldi M. Azka*)